

ANALISIS KONFLIK NDUGA DARI PERSPEKTIF MAHASISWA UKSW ASAL PAPUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAM

Yakomina Yohana Andatu^{1*}, Nani Mediatati²

^{1,2}Universitas Kristen Satya Wacana

¹1172021006@student.uksw.edu, ²nani.mediatati@uksw.edu

ABSTRACT

This study aims to explore the perspectives of Satya Wacana Christian University (UKSW) students from Papua on the armed violence conflict that occurred in Nduga, Papua Mountains, and its impact on the protection of human rights in the area. The research method used is qualitative with an in-depth interview approach to collect data from students who have a background and direct experience related to the conflict. The results showed that students had diverse views on the causes and impacts of the conflict, including the political, economic and social factors that contributed to the tensions in Nduga. In addition, students also highlighted the negative impact of the conflict on human rights protection, such as violations of the right to life, the right to education, and the right to health. Recommendations resulting from this research include the need for dialogue between conflicting parties, increasing the role of the government in protecting the community.

Keywords: *armed violence conflict, nduga papua, human rights protection, student perspective*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) asal Papua terhadap konflik kekerasan bersenjata yang terjadi di Nduga, Papua Pegunungan, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data dari mahasiswa yang memiliki latar belakang dan pengalaman langsung terkait konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pandangan yang beragam mengenai penyebab dan dampak konflik, termasuk faktor politik, ekonomi, dan sosial yang berkontribusi terhadap ketegangan di Nduga. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dampak negatif konflik terhadap perlindungan HAM, seperti pelanggaran hak atas kehidupan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup perlunya dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, peningkatan peran pemerintah dalam melindungi masyarakat

Kata Kunci: konflik kekerasan bersenjata, nduga papua, perlindungan hak asasi manusia, perspektif mahasiswa

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang secara kodrati dan fundamental melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi. Esensi dari HAM adalah perlindungan atas eksistensi manusia secara menyeluruh, dengan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab individu semata, tetapi juga menjadi kewajiban kolektif antara warga negara, pemerintah (baik sipil maupun militer), dan negara itu sendiri. HAM tidak diberikan oleh negara atau lembaga manapun, melainkan berasal langsung dari Tuhan, sehingga bersifat tidak dapat dicabut. Karena itu, HAM bersifat universal, berlaku dimanapun dan untuk siapa pun tanpa pengecualian. Selain sebagai pelindung martabat dan integritas manusia, HAM juga menjadi dasar moral dalam interaksi sosial (Darmawan, 2005)

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan tindakan yang

dapat dilakukan oleh individu, kelompok, bahkan oleh aparaturnegara, baik secara disengaja maupun akibat kelalaian. Setiap tindakan yang mencabut atau mengabaikan HAM, meskipun tidak direncanakan, tetap termasuk dalam pelanggaran hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM sering kali belum berjalan secara maksimal, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Konflik bersenjata atau *armed conflict* adalah fenomena yang umum dalam dinamika internasional. Sejak diberlakukannya Konvensi Jenewa 1949, dunia telah menyaksikan banyak konflik bersenjata yang terjadi hampir di setiap negara. Konflik tersebut dapat berakar dari pertentangan kepentingan antar negara maupun konflik internal antar kelompok dalam satu negara. Secara umum, konflik ini sering dipandang sebagai bentuk perjuangan untuk mempertahankan atau memperjuangkan kepentingan nasional (Pemanasari et al., 1999).

Konflik bersenjata identik dengan kekerasan dan permusuhan

antara pihak-pihak yang saling bertikai. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa konflik semacam ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kekejaman yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan (Antonius et al., 2002). Meskipun telah terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tata cara peperangan dan perlindungan terhadap korban konflik, kenyataannya aturan-aturan tersebut sering diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam setiap konflik bersenjata, masih banyak korban berjatuh, menunjukkan bahwa efektivitas regulasi terkait konflik bersenjata masih sangat terbatas (Pemanasari et al., 1999).

Salah satu contoh nyata terjadi di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Sejak 2 Desember 2018, wilayah ini mengalami konflik bersenjata yang dipicu oleh penembakan terhadap para pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan dalam proyek Trans Papua. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata yang merupakan bagian dari Organisasi Papua

Merdeka (KKB-OPM), yang dipimpin oleh Egianus Kogoya. Serangan bermula setelah salah satu pekerja mengambil foto kegiatan kelompok tersebut, yang dianggap sebagai tindakan provokatif. Insiden ini menimbulkan ketakutan luas di kalangan warga, serta menambah penderitaan bagi keluarga para korban (BBC News Indonesia, 2019).

Menurut laporan dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, sedikitnya 243 orang, termasuk warga sipil dan 20 pekerja Istaka Karya, tewas dalam konflik sejak 2018. Selain korban jiwa, konflik juga memicu pengungsian besar-besaran. Ribuan warga Nduga terpaksa mengungsi ke berbagai daerah, termasuk ke Wamena, di mana terdapat 46 posko pengungsi, namun sebagian besar belum pernah menerima bantuan yang memadai (BBC News Indonesia, 2019). Ketegangan terus berlanjut hingga 2023, ketika pada 7 Februari, kelompok bersenjata kembali melakukan aksi kekerasan dengan membakar pesawat Susi Air dan menyandera pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens, serta belasan pekerja sipil di Bandara Paro, Nduga. Aksi kekerasan ini direspons oleh

aparatus keamanan dengan operasi militer, termasuk penembakan terhadap anggota OPM, yang terbaru terjadi pada Juli 2024.

Konflik yang berlangsung di Nduga telah menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat sipil, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, pengungsian massal, dan hilangnya rasa aman. Pendekatan represif melalui operasi militer seringkali dianggap memperburuk situasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendekatan yang lebih humanis, berbasis dialog, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam menyelesaikan konflik ini secara damai dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam perspektif mahasiswa Papua asal Nduga terhadap tindakan separatis yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, serta untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan konflik bersenjata yang masih berlangsung terhadap mahasiswa asal daerah tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan

untuk mengeksplorasi secara subjektif realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Penelitian dilaksanakan di kota Salatiga, khususnya di daerah Kemiri Raya-Blotongan, Kecamatan Sidorejo, yang dipilih karena merupakan salah satu tempat tinggal mahasiswa asal Papua, khususnya dari Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari September hingga Desember 2024, dengan melibatkan populasi sebanyak 40 orang. Untuk keperluan analisis, diambil sampel sebesar 50% dari total populasi, sehingga jumlah sampel yang dihitung adalah 20 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Konflik kekerasan bersenjata di Nduga Papua dari tahun 2018-2024 dan penyebabnya

Konflik kekerasan bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, antara tahun 2018 hingga 2024, melibatkan serangkaian insiden yang berkaitan dengan kelompok bersenjata,

terutama Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan aparat keamanan Indonesia. Insiden pertama terjadi pada 2 Desember 2018, di mana 184 orang tewas, termasuk 20 pekerja PT Istaka Karya, akibat penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin oleh Egianus Kogoya. Insiden ini dipicu oleh tindakan salah satu pekerja yang mengambil foto kegiatan upacara oleh OPM, yang dianggap sebagai provokasi.

Selanjutnya, konflik bersenjata antara KKB dan aparat keamanan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2022, mengakibatkan 59 orang tewas. Ketegangan yang terus berlanjut antara aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan menyebabkan banyak warga sipil terjebak dalam konflik, sehingga banyak dari mereka terpaksa mengungsi ke daerah lain, seperti Wamena, dengan 46 posko pengungsi yang ada di sana, di mana 26 di antaranya belum mendapatkan bantuan.

Pada 7 Februari 2023, terjadi insiden penyanderaan di mana lima penumpang dan awak pesawat Susi Air disandera, serta lima belas pekerja sipil lainnya. Kelompok bersenjata

OPM melakukan penyanderaan ini sebagai bentuk protes terhadap proyek-proyek pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat lokal. Pada Juli 2024, TNI menembak mati beberapa anggota OPM, termasuk tiga anggota di Puncak Jaya, sebagai respons terhadap serangan dan ancaman yang terus berlanjut dari kelompok bersenjata.

Secara keseluruhan, konflik di Nduga selama periode tersebut ditandai oleh serangkaian insiden kekerasan yang melibatkan kelompok bersenjata OPM dan aparat keamanan, dengan penyebab utama yang meliputi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, tindakan provokatif yang dianggap mengancam eksistensi kelompok pro-kemerdekaan, serta ketidakamanan yang terus menerus mempengaruhi kehidupan masyarakat sipil. Korban jiwa yang tercatat mencapai lebih dari 243 orang, ditambah dengan banyaknya warga yang mengungsi dan hidup dalam ketakutan.

Sebagian besar responden dalam wawancara mengungkapkan pengalaman emosional yang mendalam terkait dampak konflik di Nduga. Mereka yang memiliki keluarga atau kenalan yang menjadi

korban konflik bersenjata menceritakan trauma yang dialami, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak dari mereka sering merasa khawatir akan keselamatan orang-orang terkasih di Nduga, dengan perasaan sedih, marah, dan tidak berdaya mendominasi tanggapan mereka. Konflik ini sering dianggap sebagai luka yang sulit disembuhkan, terutama ketika media terus memberitakan kekerasan tanpa menawarkan solusi nyata.

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber mencerminkan kompleksitas dan kedalaman masalah yang dihadapi oleh masyarakat Papua, yang berkaitan dengan sejarah panjang, hak atas tanah, dan pengabaian terhadap budaya lokal. Sejarah yang panjang ini sering kali melibatkan konflik antara masyarakat adat dan pihak luar, termasuk pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Masyarakat Papua merasa bahwa hak-hak mereka, terutama terkait dengan tanah dan sumber daya alam, tidak dihargai dan diabaikan, yang menimbulkan ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan masyarakat. Salah satu isu yang sering diangkat adalah

pengiriman aparat keamanan oleh pemerintah, yang sering kali dianggap sebagai respons terhadap konflik yang terjadi. Narasumber menyebutkan bahwa konflik yang terjadi pada tahun 2018, yang melibatkan pembunuhan pekerja jembatan, dijadikan alasan untuk meningkatkan kehadiran militer di Papua. Namun, banyak masyarakat yang merasa bahwa tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah yang ada, melainkan justru menambah ketegangan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Mereka merasa bahwa pemerintah tidak memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga solusi yang diambil tidak tepat sasaran. Selain itu, terdapat pandangan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sering kali tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Banyak narasumber merasa bahwa berita yang beredar hanya berdasarkan dugaan dan spekulasi, tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang konteks dan latar belakang konflik. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian kalangan masyarakat, yang merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dalam narasi yang dibangun oleh media dan pemerintah.

Salah satu narasumber, Belinda K, menyatakan, *“Kenyataan yang terjadi itu sebenarnya jauh dari yang diberitakan, karena media Indonesia ini tidak pernah benar kalau soal Papua; jika yang jadi korban itu tentara kiriman dari ibu kota, baru heboh, sedangkan warga sipil tidak pernah diberitakan, cerita dan derita itu hanya habis dikita saja.”*

Secara keseluruhan, pernyataan dari narasumber menunjukkan bahwa konflik di Papua bukanlah masalah yang sederhana, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara sejarah, budaya, dan kepentingan ekonomi. Untuk mencapai solusi yang berkelanjutan, penting bagi semua pihak untuk mendengarkan suara masyarakat Papua, menghormati hak-hak mereka, dan mencari cara untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada dialog.

Dampak Konflik Kekerasan Bersenjata Terhadap Kehidupan Masyarakat di Nduga Papua

Dampak konflik di Nduga terhadap masyarakat sangat luas dan meresap ke berbagai aspek kehidupan. Kehidupan sehari-hari masyarakat terganggu secara

signifikan, memaksa banyak dari mereka untuk meninggalkan rumah dan hidup dalam kondisi pengungsian. Situasi ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik mereka, tetapi juga berdampak pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian yang semakin terbatas.

Dalam bidang pendidikan, konflik ini menyebabkan banyak tenaga pengajar, seperti guru, meninggalkan tempat tugas mereka karena merasa tidak aman. Akibatnya, anak-anak di Nduga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Generasi muda di daerah ini menghadapi risiko kehilangan akses pendidikan berkualitas dan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Banyak dari mereka lebih memilih untuk terlibat dalam diskusi tentang kebebasan Papua daripada duduk di bangku sekolah dan belajar tentang keadilan yang seolah tidak pernah terwujud bagi bangsa mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa bahwa kondisi ini dapat menciptakan generasi yang trauma dan kehilangan harapan untuk masa depan yang damai.

Dari segi kesehatan, konflik ini juga memberikan dampak yang

serius. Banyak tenaga kesehatan meninggalkan daerah tersebut karena situasi yang tidak aman, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi sangat terbatas. Masyarakat yang tinggal di pengungsian sering kali tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, yang dapat mengakibatkan meningkatnya risiko penyakit dan kematian, terutama di kalangan anak-anak dan orang tua.

Dalam aspek ekonomi, konflik ini mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka. Ketakutan untuk keluar mencari makan dan mengelola kebun membuat mereka terpaksa meninggalkan sumber penghidupan yang selama ini mereka andalkan. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan luar, yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka. Masyarakat yang seharusnya dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup kini terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Dari segi sosial, konflik ini menciptakan perpecahan dalam komunitas. Ketidakpastian dan ketakutan yang melanda masyarakat

menyebabkan mereka terpaksa berpisah dari keluarga dan orang-orang terkasih demi keselamatan. Anak-anak kecil terpisah dari orang tua mereka karena orang tua merasa terpaksa mengirim anak-anak mereka ke tempat yang lebih aman. Masyarakat yang seharusnya hidup dalam harmoni kini hidup dalam kepanikan dan ketidakpastian, seolah-olah mereka tidak memiliki rumah di tanah mereka sendiri.

Dalam hal keamanan, situasi di Nduga sangat mengkhawatirkan. Masyarakat hidup dalam ketakutan setiap hari, selalu mencemaskan keselamatan diri dan keluarga mereka. Ketidakamanan ini tidak hanya disebabkan oleh konflik bersenjata, tetapi juga oleh tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan. Banyak yang merasa bahwa pemerintah tidak memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini, melainkan hanya mengirimkan tentara yang sering kali dianggap ancaman masyarakat sipil.

Upaya atau Solusi Penyelesaian Konflik Kekerasan Bersenjata di Nduga Papua

Pernyataan dari mahasiswa yang mencerminkan pemahaman mendalam mengenai penyebab dan

solusi konflik di Nduga. Mereka menekankan bahwa penyelesaian konflik hanya dapat dicapai melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua. Edgar, salah satu narasumber, menyatakan, "Penting bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan semua pihak, termasuk kelompok pro-kemerdekaan, agar kita dapat memahami akar masalah dan mencari solusi yang saling menguntungkan." Mahasiswa juga menegaskan bahwa keadilan sejati harus diberikan kepada masyarakat, bukan sekadar proyek yang tidak berdampak signifikan. Mikhael menambahkan, "Investasi dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial di Papua penting untuk mendukung perdamaian."

Mahasiswa menggarisbawahi bahwa konflik yang dimulai pada 2018 seharusnya dapat diselesaikan, namun hingga kini masih menjadi sorotan tanpa penyelesaian yang memadai. Mereka menyoroti ketidakadilan, marginalisasi, dan eksploitasi sumber daya alam sebagai akar penyebab konflik, dimana masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dari kekayaan alam yang ada. Selain itu,

mereka juga menyoroti peran media sering menyebarkan berita tidak akurat, memperburuk ketegangan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

Mahasiswa berharap adanya dialog inklusif antara pemerintah, masyarakat Papua, dan kelompok bersenjata, seperti KKB. Mereka percaya bahwa pemerintah harus mendengarkan kebutuhan masyarakat Papua dan menghormati adat istiadat serta budaya lokal. Mereka meminta agar pengiriman aparat keamanan dihentikan, karena dapat memperburuk keadaan.

Pemerintah diharapkan mengambil pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dialog yang jujur dan terbuka harus menjadi prioritas, di mana suara masyarakat asli Papua didengar. Aparat keamanan juga perlu beroperasi dengan pendekatan humanis, menghindari tindakan represif dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan.

Masyarakat Papua diharapkan berperan aktif dalam dialog, menyampaikan aspirasi dan bersatu untuk mengatasi ketidakadilan. KKB

juga harus dilibatkan dalam dialog untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai. Secara keseluruhan, pandangan mahasiswa mencerminkan harapan akan terciptanya solusi berkelanjutan dan damai untuk konflik di Nduga, dengan pemerintah menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dialog yang inklusif diharapkan dapat membuka jalan menuju keadilan dan perdamaian yang diidamkan masyarakat Papua.

Perlindungan dan penegakan HAM Bagi Masyarakat Nduga Papua Sebagai Dampak Konflik Kekerasan bersenjata

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Nduga, Papua, mencakup berbagai bentuk yang serius dan kompleks. Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di wilayah ini antara lain:

1. Kekerasan Fisik dan Penangkapan Sewenang-wenang: Banyak laporan menunjukkan adanya tindakan kekerasan fisik terhadap masyarakat sipil, termasuk penangkapan tanpa proses hukum yang jelas. Aparat keamanan sering kali menangkap individu

yang dianggap terlibat dalam gerakan pro-kemerdekaan atau yang dianggap mengancam stabilitas.

2. Pelanggaran Kebebasan Berpendapat: Masyarakat di Nduga sering mengalami pembatasan dalam menyampaikan pendapat. Aktivitas demonstrasi atau protes terhadap kebijakan pemerintah sering kali dihadapi dengan tindakan represif, termasuk intimidasi dan ancaman.

3. Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi: Terdapat laporan mengenai penyiksaan terhadap tahanan, baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan oleh aparat keamanan, menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat.

4. Pengabaian Terhadap Kesejahteraan Sosial: Masyarakat Papua, termasuk di Nduga, sering mengalami pengabaian dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang berkontribusi pada pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

5. Displacement dan Penggusuran: Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal terpaksa

meninggalkan tempat tinggal mereka akibat operasi militer atau proyek pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan.

Untuk menghadapi pelanggaran HAM ini, pemerintah seharusnya mengambil langkah perlindungan yang lebih efektif, antara lain:

1. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan: Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap individu yang mengalami pelanggaran HAM memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan keadilan, termasuk penyediaan mekanisme pengaduan yang transparan dan akuntabel.
2. Pendidikan dan Kesadaran HAM: Pemerintah harus mengedukasi aparat keamanan dan masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Pelatihan tentang HAM bagi aparat penegak hukum dapat membantu mengurangi pelanggaran yang terjadi.
3. Dialog dan Pendekatan Non-Kekerasan: Mengganti pendekatan militer dengan dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua dapat membantu

meredakan ketegangan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

4. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Setiap proyek pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak mereka dihormati dan diakomodasi.
5. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah perlu membentuk lembaga independen untuk memantau dan mengevaluasi situasi HAM di Papua, dengan wewenang untuk menyelidiki pelanggaran dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Harapan untuk masa depan Masyarakat Nduga Papua

Harapan untuk masa depan Papua sangat besar di kalangan responden. Mereka berharap agar Nduga dapat kembali damai sehingga masyarakatnya bisa hidup tanpa rasa takut, tinggal dan tidur dengan nyenyak di rumah mereka, berkebun tanpa khawatir akan ancaman pembunuhan, serta bersekolah di lingkungan yang nyaman dengan pengajaran dari guru tanpa takut sekolah dibakar. Pembangunan yang

inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal menjadi harapan utama. Langkah konkret seperti dialog damai, pengurangan pendekatan militeristik, peningkatan perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta pemberdayaan masyarakat lokal dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai perdamaian.

D. Kesimpulan

Mahasiswa asal Papua memiliki pandangan kritis terhadap konflik kekerasan bersenjata di Nduga. Mereka menekankan perlunya pendekatan damai, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta pemberdayaan masyarakat sebagai solusi jangka panjang. Dalam konteks ini, mahasiswa melihat diri sebagai agen perubahan yang dapat berkontribusi meningkatkan kesadaran dan mencari solusi untuk isu di Papua. Hal ini menggambarkan pentingnya inklusivitas dan empati dalam mencari solusi untuk konflik berkepanjangan di Nduga.

Dampak dari konflik ini sangat signifikan terhadap perlindungan HAM di Kabupaten Nduga, di mana banyak warga sipil menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Situasi keamanan yang tidak stabil juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik melalui mediasi dan dialog diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut, dengan penekanan pada pentingnya perdamaian dan kesatuan dalam masyarakat.

Sebagai saran, mahasiswa menekankan perlunya peningkatan kesadaran akan isu-isu hak asasi manusia (HAM), penguatan akses keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mereka mendorong pemerintah untuk mengedepankan pendekatan non-kekerasan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil di Nduga. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya, beberapa aspek penting perlu diperhatikan. Pertama, studi mendalam tentang pelanggaran HAM diperlukan untuk memahami berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di Nduga, termasuk dampaknya terhadap masyarakat, yang dapat melibatkan wawancara dengan korban dan pengumpulan data dari berbagai sumber. Kedua, analisis

mengenai efektivitas pendekatan non-kekerasan dalam menyelesaikan konflik di Papua dapat memberikan wawasan baru, termasuk studi kasus dari daerah lain yang berhasil menerapkan dialog dan mediasi. Ketiga, penting untuk mengkaji peran media dalam meliput isu-isu HAM di Papua, serta bagaimana media dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan advokasi untuk perlindungan HAM. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih efektif untuk isu-isu yang dihadapi di Nduga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Darmawan. (2005). *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter*. Kumpulan Tulisan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 51.
- Antonius, dkk. (2002). *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 175.
- Arlina Pemanasari, dkk. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC, hlm. 3.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Nduga dalam Angka 2024*. Nduga: BPS Kabupaten Nduga.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pertanian Kabupaten Nduga 2024*. Nduga: BPS Kabupaten Nduga.
- Baxter Magolda, M. B. (2001). *Making Their Own Way: Narratives for Transforming Higher Education to Promote Self-Development*. Sterling, VA: Stylus Publishing.
- BBC News Indonesia. (2019, 14 Agustus). "Korban Meninggal Akibat Konflik di Nduga, Papua 182 Orang: 'Bencana Besar Tapi di Jakarta Santai-Santai Saja'." Diakses pada 12 Agustus 2024, pukul 02.48. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia49345664>.
- D. G. Pruit dan J. Z. Rubin. (2009). *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*. New York: McGraw-Hill, hlm. 9.
- Harmen Batubara. (2013). *Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah*. hlm. 7. Diakses pada 19 Agustus 2024, pukul 15.40.
- Kartika, V.R., & Hamid, S. (2020). Developing Papua As A Way Out To Overcome The Armed Violence Group (Kelompok Kekerasan Bersenjata) in Papua. *Jurnal Studi Konflik dan Perdamaian*, 4(1), 25-45.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Laporan Pelaksanaan Asesmen Nasional di Kabupaten Nduga*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2021). *Laporan*

*Pemantauan Pelanggaran Hak
Asasi Manusia di Nduga.*

- Kusno, A., Arimi, & Wahidiyas, M. H. (2022). Identifikasi Propaganda Organisasi Papua Merdeka: Upaya Preventif Disintegrasi Bangsa.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 3-5.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, hlm. 16.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Pasal 1, 2, dan 7.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). *Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)*, Pasal 2.
- Philip Alston. (2010). *International Human Rights: Law, Policy, and Process*. New York: Oxford University Press, pasal 28.
- Robbins, S. P., & Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, hlm. 57.
- Roosevelt, Eleanor. (1950). Laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Pasal 28 dan Pasal 29.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana, hlm. 345.
- Sudjana, N. (2010). *Pembelajaran dalam Perspektif Mahasiswa*. Bandung